

Darno, Pestasius. (2020). Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Kutai Barat Dalam Pengembangan Home Industri. *Vol. 1(2). 140-146*

---

## Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Kutai Barat Dalam Pengembangan Home Industri

Pestasius Darno\*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

---

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:  
Received:  
14 Mei 2020  
Received in revised form:  
10 Juni 2020  
Accepted:  
7 Juli 2020

#### Keyword:

UMKM, Industrial Home Development

#### Kata Kunci:

UMKM, Pengembangan Home Industri

### ABSTRACT

*This research was conducted in Disperindagkop and UKM West Kutai Regency. This is because Disperindagkop and UKM are technically responsible for the growth and development of industrial homes in West Kutai regency. Researchers also conducted research in several home centers of the craft and small food industry in West Kutai Regency which is the object of Disperindagkop and UKM WestKutai Regency that must continue to be developed. Based on the results of research conducted by analyzing the data, information and explanations obtained, it can be concluded that the implementation of the industrial home development strategy in West Kutai Regency is based on the West Kutai Regency Regent Regulation No.2 of 2009 on the description of the main duties and functions of structural positions in Disperindagkop and SMEs of West Kutai Regency, then Disperindagkop and UKM of West Kutai Regency have the task of helping the Regent in carrying out authority of the district government in the field of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs based on the principle of autonomy and assistance duties. Included in the development of industrial home. In the application of home industry development strategy, there are supporting factors, namely and a good cooperation between Disperindagkop and UKM of West Kutai Regency with supporting parties such as agencies, banking institutions and other related practitioners, as well as harmonious relationships with small entrepreneurs. There are also inhibitory factors, such as internal inhibitor factors from Disperindagkop and UKM West Kutai Regency, namely the level of quality and quantity of the apparatus is still limited, the amount of budget funds for theUKM development program. As well as supporting facilities and infrastructure that are still inadequate. External inhibiting factors, namely the level of quality of human resources are still limited, lack of interest in self-entrepreneurship (no regeneration), high production prices while low purchasing power of the community, the creation of crafts and small food is still monotonous, and security conditions and political situations are not conducive.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dikarenakan Disperindagkop dan UKM merupakan penanggungjawab teknis dalam pertumbuhan dan pengembangan home industri di kabupaten Kutai Barat. Peneliti juga melakukan penelitian di beberapa sentra-sentra home industry kerajinan dan makanan kecil di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan objek dari Disperindagkop dan UKM KabupatenKutai Barat yang harus terus dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data- data, keterangan dan penjelasan yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksana strategi pengembangan home industri di Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat No.2 Tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan structural pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat, maka Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Termasuk dalam pengembangan home industri. Dalam penerapan strategi pengembangan home industri, terdapat factor pendukung yaitu dan jalinan kerjasama yang baik antara Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dengan pihak pendukung seperti instansi, lembaga perbankan dan praktisi-praktisi lain yang terkait, serta hubungan yang harmonis dengan pengusaha kecil. Ada pula factor penghambat, seperti factor penghambat internal dari Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat yaitu tingkat kualitas dan kuantitas aparat masih terbatas, jumlah anggaran dana untuk program pengembanganUKM. Serta sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai. Faktor penghambat eksternal yaitu tingkat kualitas sumberdaya manusia masih terbatas, kurangnya minat berwiraswasta (tidak ada regenerasi), harga produksi yang tinggi sedangkan daya beli masyarakat rendah, hasil kreasi kerajinan dan makanan kecil masih monoton, serta kondisi keamanan dan situasi politik yang belum kondusif.

---

\* Corresponding author: [pestasiusdarno@untag-smd.ac.id](mailto:pestasiusdarno@untag-smd.ac.id)

## Pendahuluan

Tujuan negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dalam mewujudkannya maka dilaksanakan pembangunan, yaitu suatu perubahan yang terencana dari suatu kondisi nasional tertentu menuju kondisi yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Maka dari itu diperlukan strategi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan pendapatan nasional secara berarti dengan meningkatkan pendapatan perkapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Salah satunya dengan industrialisasi, yang diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Selama ini telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu perkembangan industri kecil dan menengah melalui berbagai program pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah, sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1993 disebutkan:

"Industri kecil dan menengah termasuk kerajinan dan industri rumah tangga perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri." (1993:91)

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi industri kecil yang cukup besar yang dapat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data, Kabupaten Kutai Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga menyediakan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Badan Pusat Statistik mengemukakan, dari hasil pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2013, sumbangan sektor industri dan perdagangan masih menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu sebesar lebih dari 50 %, bila dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 20013, industri di kabupaten ini merupakan sektor terbesar dilihat dari PDRB yaitu Rp. 1.631.881,81 dari total Rp. 3.930.470,48.

Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah yang potensial seperti yang tercermin dalam visi Kutai Barat yang masyarakatnya sejahtera, cerdas, sehat, dan produktif berbasiskan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Kutai Barat terdapat sekitar 114 sentra industri kecil dan 1.056 unit usaha non sentra industri kecil yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti industri kerajinan, industri kecil makanan, industri kecil konveksi, industri kecil meubel, dan industri kecil lainnya yang masing-masing memiliki produkunggulannya.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat ini belum dapat berkembang dengan baik, maka diperlukan suatu upaya untuk terus mengembangkan home industry ini. Perlu adanya pembinaan dari dinas atau instansi terkait sangat diperlukan guna pengembangan home industri. Pembinaan yang dibutuhkan pada aspek kelembagaan pengrajin untuk standarisasi harga, pembinaan teknis untuk standarisasi produk dan peningkatan mutu, penyerapan tenaga kerja, serta pameran untuk menjangkau pembeli. Sehingga perkembangan dari home industri ini dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi para pengrajin dan pengusaha kecil serta keluarganya.

Perkembangan industri kecil dan menengah terutama home industri hingga saat ini masih berjalan lambat dan belum bisa dikembangkan secara maksimal, karena pada kenyataannya kemajuan industri kecil dan menengah sangat kecil jika dibandingkan kemajuan yang sudah dicapai industri besar. Industri kecil dan menengah terutama home industri seringkali terabaikan hanya karena memiliki modal kecil, hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Selain itu industri kecil dan menengah juga menghadapi ancaman persaingan yang semakin ketat ditandai dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar negeri yang memiliki kualitas dan harga yang lebih murah. Sehingga keberadaan industri kecil dan menengah, khususnya di sektor tradisional, berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh industri berskala besar baik dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi saat ini terjadi krisis ekonomi global yang diawali bangkrutnya lembaga keuangan multinasional di Amerika Serikat, sehingga membuat perekonomian dunia termasuk negara kita ikut terancam dan pastinya berdampak pada sektor riil khususnya industri kecil dan menengah. Berdasarkan pengalaman pada tahun 1997-1998, sektor industri kecil dan menengah terbukti cukup kuat dalam menghadapi krisis. Maka perlu segera diperkuat dan diberdayakan. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pelestarian seni-budaya nasional. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat harus segera menetapkan strategi guna mengatasi permasalahan yang ada dalam mengembangkan home industri. Dengan melakukan usaha-usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga home industri seperti kerajinan dan makanan kecil dapat tumbuh dan berkembang.

Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pelestarian seni-budaya nasional. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat harus segera menetapkan strategi guna mengatasi permasalahan yang ada dalam mengembangkan home industri. Dengan melakukan usaha-usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga home industri seperti kerajinan dan makanan kecil dapat tumbuh dan berkembang.

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan home industri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengembangan home industri di Kabupaten Kutai Barat?

## Pembahasan

Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 167 orang pegawai, terdiri 126 orang pegawai laki-laki dan 41 orang pegawai perempuan yang telah terbagi berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi industri kecil yang sangat besar, seperti memberikan kontribusi yang cukup baik dalam penyerapan tenaga kerja disektor industri formal maupun non formal. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dari data yang ada terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah industri kecil formal di Kabupaten Kutai Barat tercatat 37 unit usaha, sedangkan industri kecil non formal sebanyak 76 unit usaha. Pada tahun 2014 industri kecil formal dan industri kecil non formal mengalami perkembangan menjadi 68 dan 94 unit usaha. Dan pada tahun 2015, industri kecil formal juga mengalami perkembangan menjadi 84 unit usaha, dan mengalami kenaikan jumlah unit usaha pada industri kecil non formal yakni 114 unit usaha. Industri kecil yang berada di Kabupaten Kutai Barat sebenarnya merupakan industri yang sudah ada sejak lama. Secara histori industri kecil tersebut merupakan warisan secara turun-temurun yang dipelihara oleh keluarga dan sebagian besar mengelompok dalam satu daerah, sehingga memudahkan dalam pembinaan.

### Strategi Pengembangan Home Industri

Strategi pengembangan home industri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pembinaan dan pemberian bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan home industri batik tulis agar menjadi industri yang tangguh dan mandiri, sekaligus dapat melestarikan seni-budaya nasional. Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat selaku instansi yang mendapat tugas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan program di tingkat kabupaten dalam pengembangan home industri.

Sebagai pelaksana dari strategi pengembangan home industri, maka Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat memiliki konsep tentang pengembangan home industri. Pada intinya pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengusaha kecil maupun pengrajin. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa apabila para pengusaha kecil memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka diharapkan mereka dapat mengelola usahanya secara benar dengan prinsip-prinsip manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan dengan baik. Sehingga diharapkan usahanya dapat tetap eksis dan semakin berkembang serta dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Strategi yang digunakan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan home industri berupa strategi yang bersifat kontijensi, yaitu dalam pemecahan masalah Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat akan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat mengikuti petunjuk dari pusat mengenai strategi yang digunakan.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Strategi Pengembangan Home Industri.**

Salah satu faktor pendukung dalam penerapan strategi pengembangan home industri adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat, para pengusaha kecil, dan pihak lain yang mendukung. Faktor lainnya adalah semangat dan kemauan dari para pengusaha kecil untuk saling bertukar informasi sehingga memudahkan aparat Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan tugasnya yakni membantu para pengusaha kecil. Hal ini juga yang akhirnya menumbuhkan rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Selain terdapat faktor yang mendukung Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam penerapan strategi pengembangan home industri batik tulis, terdapat 3 faktor yang menghambat dalam penerapan strategi ini, yaitu:

#### **Faktor Penghambat Internal**

Dalam pelaksanaannya, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat sendiri mempunyai beberapa kendala, sehingga kurang dapat memaksimalkan program pengembangan home industri. Kendala tersebut antara lain:

- a) Tingkat kualitas dan kuantitas SDM aparat masih terbatas.
- b) Sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai

#### **Faktor Penghambat Eksternal**

Kendala eksternal berasal dari luar Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat, kendala ini datang dari pengusaha atau pengrajin batik tulis maupun keadaan lingkungan secara umum yang mempengaruhi iklim usaha.

#### **Faktor Penghambat pada Birokrasi**

Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan home industri seringkali terhambat oleh kendala birokrasi. Kendala birokrasi yang dihadapi tidak banyak, namun kadang mengganggu kegiatan operasional yang menyangkut pengembangan IKM. Kendala yang sering dihadapi antara lain Kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan di daerah. Misalnya, sudah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) di tingkat Pusat namun belum diterimanya Petunjuk Teknis oleh Instansi di Daerah.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data- data, keterangan dan penjelasan yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksana strategi pengembangan home industri di Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat No.2 Tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat, maka Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Termasuk dalam pengembangan home industri.

Dalam mengembangkan home industri bentuk strategi yang digunakan adalah strategi kontijensi, dimana dalam pemecahan masalah Disperindagkop & UKM Kabupaten Kutai Barat akan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menerapkan strateginya, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat akan mengidentifikasi dan menganalisis home industri, yakni melihat kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh home industri, serta melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan misinya.

Sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, terdapat 3 strategi yang diterapkan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan home industri meliputi:

1. Bimbingan dan Penyuluhan, meliputi (a) pengembangan ragam produk, (b) peningkatan kualitas produk, (c) penyuluhan perijinan, (d) pemasaran.
2. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi (a) manajemen permodalan dan keuangan, (b) teknik produksi, (c) kewirausahaan.
3. Pemberian Bantuan, meliputi (a) bantuan permodalan, (b) bantuan peralatan.

Dalam penerapan strategi pengembangan home industri, terdapat faktor pendukung yaitu adanya jalinan kerjasama yang baik antara Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dengan pihak pendukung seperti instansi, lembaga perbankan dan praktisi-praktisi lain yang terkait, serta hubungan yang harmonis dengan pengusaha kecil. Ada pula faktor penghambat, seperti faktor penghambat internal dari Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat yaitu tingkat kualitas dan kuantitas aparat masih terbatas, jumlah anggaran dana untuk program pengembangan UKM. Serta sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai. Faktor penghambat eksternal yaitu tingkat kualitas sumber daya manusia masih terbatas, kurangnya minat berwiraswasta (tidak ada regenerasi), harga produksi yang tinggi sedangkan daya beli masyarakat rendah, hasil kreasi kerajinan dan makanan kecil masih monoton, serta kondisi keamanan dan situasi politik yang belum kondusif.

Faktor penghambat pada birokrasi, seperti kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan di daerah, serta kurang terpadunya antara lembaga-lembaga terkait. Sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran dan pemanfaatan program-program dan bantuan kredit bagi pengusaha kecil.

## Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Kutai Barat GBHN Tahun 1993 & 1998

<http://jnnod-kean.blogspot.com/feeds/posts/strategi-pengembangan-ikm.htm>

Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat

Rencana Induk Pengembangan IKM 2002-2004 Buku I & II

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)

Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Pasal 15 ayat (2) tentang Perindustrian

Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil